

**PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI TENTANG  
PENYELANGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI PERGURUAN  
TINGGI**

**Chyntia Wibowo \*)**

**Gugus Irianto**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang

\*) email korespondensi : *chyntiawibowosie@gmail.com*

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa baru dan mahasiswa lama di jurusan akuntansi tentang penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi, Penelitian ini dilakukan dengan metode survei terhadap mahasiswa baru dan mahasiswa lama di Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa baru maupun mahasiswa lama memiliki kesamaan persepsi terhadap penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Hasil penelitian lebih lanjut memandang bahwa pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi akan memberikan nilai tambah bagi mahasiswa. Sedangkan penyelenggaraannya, dapat dilakukan melalui kegiatan terstruktur dalam perkuliahan maupun kegiatan tidak terstruktur dalam kegiatan non formal.

**Kata kunci : anti korupsi, pendidikan anti korupsi, persepsi, mahasiswa akuntansi**

***Abstract***

*The purpose of this study is obtain the perception difference between accounting junior students and accounting senior students about anti-corruption study at the college. The study was performed by survey to accounting junior students and accounting senior students at Faculty of Economic dan Bussiness, Brawijaya University (FEB UB). Result of this study show that there is the similiar perception between junior students and senior students about anti-corruption study at the college. Advanced result given an opinion that anti-corruption study at college has value added with structured activites on lectures and non-structured activities on non-formal activities.*

***Keywords : anti corruption, anti corruption study, perception, accounting students***

**PENDAHULUAN**

*Fraud* merupakan suatu bentuk kecurangan di mana seseorang dengan sengaja menggunakan wewenang atau jabatannya menyalahgunakan sumber daya atau aset yang dimiliki organisasi untuk memperoleh keuntungan pribadi. *The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* mendefinisikan *fraud* sebagai

penyalahgunaan wewenang atau jabatan. ACFE juga mengklasifikasikan *fraud* menjadi 3 (tiga) jenis yang disebut dengan *fraud tree*, yaitu *financial statement fraud* (kecurangan laporan keuangan), *asset misappropriations* (penyalahgunaan aset), dan *corruption* (korupsi). Di Indonesia kasus *fraud* yang terekspos besar-besaran adalah kasus terkait korupsi. Topik korupsi di Indonesia seringkali menjadi *headline* yang dimuat oleh media masa lokal, nasional, maupun internasional. Maraknya kasus korupsi di Indonesia menjadikan korupsi sulit untuk diberantas dan seakan telah menjadi budaya bangsa. Hampir setiap tahun selalu terungkap banyak kasus korupsi besar di Indonesia.

Menurut Kemp (2010) terjadinya *fraud* dipengaruhi oleh budaya atau pola pikir. Kurangnya pengetahuan terhadap peraturan juga menjadi salah satu penyebab korupsi (Jain, 2006). Supelli (2014) menyatakan bahwa pendidikan lewat sekolah merupakan lokus untuk memulai revolusi mental. Pendidikan merupakan hal yang penting dalam pembangunan bangsa baik sebagai pengembang dan peningkat produktivitas nasional maupun sebagai pembentuk karakter bangsa. Keburukan mental manusia dapat ditransformasikan ke dalam hal yang positif melalui pendidikan, karena pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Perguruan tinggi merupakan salah satu wadah untuk melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan bersih. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ditjen Dikti Kemdikbud) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah bekerja sama untuk menyelenggarakan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi sejak tahun 2012. Subyek mahasiswa dipilih karena mahasiswa merupakan masa depan bangsa dan mahasiswa berpotensi menjadi calon pemimpin yang memegang kendali bangsa di masa depan (Falah, 2012). Mahasiswa berperan sangat penting sebagai agen perubahan (*agent of change*) (Prasetyo, 2012). Sejarah telah mencatat bahwa selama ini mahasiswa telah memainkan peran yang penting dan selalu berada di garis depan dalam gerakan-gerakan pembaharuan di Indonesia, termasuk dalam gerakan anti korupsi. Melalui berbagai perannya, mahasiswa kerap bergerak pada upaya pencegahan dan membangun budaya antikorupsi di masyarakat.

Menurut ACFE (2014;55), bagian terbesar pelaku *fraud* dalam dunia kerja adalah bagian akuntansi. Mahasiswa jurusan akuntansi merupakan salah satu sumber daya manusia yang memiliki kemungkinan besar bekerja di bidang akuntansi baik di sektor publik maupun sektor swasta, bidang yang rawan terjadi kasus *fraud* termasuk korupsi. Dengan terlibatnya akuntan dalam berbagai kasus mutakhir sebelumnya hingga saat ini, pendidikan akuntansi diperlukan untuk memberikan respon yang konstruktif dan juga meningkatkan kompetensi moral calon akuntan (Irianto, 2003). Pendidikan anti korupsi adalah salah satu bentuk pendidikan yang tidak hanya menekankan aspek kognitif namun juga diharapkan dapat menyentuh aspek moral peserta didik. Sebagai salah satu sasaran penerima pendidikan anti korupsi, mahasiswa akuntansi diharapkan tidak hanya sekedar

mengetahui tetapi juga memahami tentang korupsi dan isu-isu atau permasalahan mengenai korupsi serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, tingkat pemahaman dan kepekaan mahasiswa dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya disebabkan oleh faktor-faktor dalam diri mahasiswa itu sendiri. Akibatnya, persepsi mahasiswa bisa saja berbeda antara satu dengan yang lainnya. Mahasiswa baru dan mahasiswa tingkat atas mungkin akan memiliki persepsi yang berbeda, karena adanya perbedaan pemahaman dan tingkat kepekaan termasuk dalam mempersepsikan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi.

Persepsi mahasiswa terhadap pendidikan anti korupsi selain dapat membantu upaya preventif pemberantasan kasus-kasus korupsi yang akan datang, juga dapat digunakan untuk melihat bagaimana persepsi penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi menurut perspektif mahasiswa. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Peneliti melakukan penelitian dengan membandingkan persepsi mahasiswa akuntansi semester I sebagai representasi mahasiswa yang baru dan mahasiswa semester VII sebagai representasi mahasiswa lama.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah : Apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa baru dengan mahasiswa lama mengenai penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah mengetahui perbedaan persepsi antara mahasiswa baru dengan mahasiswa lama mengenai penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Persepsi**

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (2005), persepsi adalah tanggapan dari sesuatu. Persepsi mencakup penerimaan, pengorganisasian, dan penafsiran stimulus yang telah diorganisasi dengan cara yang dapat mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap. Hal ini terjadi karena persepsi melibatkan penafsiran individu pada objek tertentu, maka masing-masing objek akan memiliki persepsi yang berbeda walaupun melihat objek yang sama (Gibson et al., 1996: 134). Persepsi merupakan hal yang penting untuk dipelajari karena persepsi mendasari perilaku manusia, Perilaku manusia didasarkan pada persepsi mereka mengenai realitas yang ada, bukan mengenai realitas itu sendiri (Robbins, 2006).

### **Korupsi**

Korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* yang berarti perbuatan busuk memutar balik, menyogok serta melanggar norma hukum yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain sedangkan pelakunya berusaha mendapatkan keuntungan

secara sepihak. Di dunia internasional, menurut Black (1990), korupsi berarti suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya "sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya.

Di Indonesia korupsi didefinisikan sebagai penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005). Sedangkan menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 21 Tahun 2001 yang dimaksud dengan korupsi yakni setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bank Dunia dan Gonzales (2000) menengarai adanya tiga ancaman besar pada negara yang diakibatkan oleh korupsi, yaitu :

- a. Merusak kemajuan tujuan pembangunan suatu negara: merugikan kalangan miskin, menciptakan risiko makro ekonomi yang besar, mempertaruhkan stabilitas keuangan, mengganggu keamanan umum dan ketertiban hukum, serta merusak legitimasi pelaksanaan negara di kalangan rakyatnya.
- b. Merupakan risiko yang serius terhadap efektivitas proyek yang dibiayainya.
- c. Melemahkan kepercayaan publik dalam asistensi pembangunan

### **Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Indonesia**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU) tentang Kerja Sama dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk Pendidikan Anti Korupsi (PAK), pada tahun 2012. Perguruan tinggi memiliki peran penting sebagai penjaga dan pengembang integritas bangsa, bukan saja sebagai bagian dari gerakan antikorupsi. Pada saat yang sama institusi pendidikan ini bisa menjadi tonggak bagi pembangunan akuntabilitas dan transparansi. Perguruan tinggi bisa menjadi motor penggerak integritas karena mampu berperan penting dalam menghentikan bertambahnya jumlah koruptor di negeri ini. Ditjen Dikti dan KPK membentuk tim penyusun dari perwakilan perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk membuat buku ajar yang berisi materi dasar mata kuliah Pendidikan Anti-Korupsi bagi mahasiswa. Dikti dan KPK telah melaksanakan kegiatan Training of Trainers (TOT) Pendidikan Antikorupsi Tahun 2012, bagi 1007 Dosen di 526 Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia. Kemudian diharapkan 526 Perguruan Tinggi tersebut, yang terdiri dari 92 Perguruan Tinggi Negeri dan 434 Perguruan Tinggi Swasta, menyelenggarakan Pendidikan Anti Korupsi dimulai pada Tahun Akademik Baru 2012/2013.

Puspito *et al.* (2011) menjelaskan bahwa mata kuliah Pendidikan Antikorupsi lebih menekankan pada pembangunan karakter anti-korupsi (*anti-corruption character building*) pada diri individu mahasiswa. Tujuan dari matakuliah pendidikan anti korupsi adalah membentuk kepribadian anti-korupsi pada diri pribadi mahasiswa serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai agent of change bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi. Mahasiswa yang merupakan agen perubahan sosial diharapkan dapat fokus membangun budaya antikorupsi di masyarakat. Pendidikan anti korupsi (PAK) pun menjadi penting sebagai bekal pengetahuan mahasiswa tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Tidak hanya itu, mahasiswa juga harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari (KPK, 2013).

Agar visi dan misi PAK tercapai, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah membuat acuan buku ajar untuk PAK. Sesuai buku ini, mahasiswa akan mempelajari delapan topik utama yaitu pengertian korupsi, faktor penyebab korupsi, dampak masif korupsi, nilai dan prinsip antikorupsi, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi; tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan; dan peran mahasiswa dalam gerakan antikorupsi. Menurut Puspito *et al.* (2011) perkuliahan PAK dapat dilaksanakan selama satu semester sebanyak 14-16 kali pertemuan tatap muka. Kedelapan topik tadi diberikan dalam delapan kali pertemuan. Sementara itu, delapan pertemuan lainnya bisa diisi dengan kuliah umum dari para tokoh pemberantasan korupsi, studi kasus, pemutaran film dan analisisnya, tugas investigasi, tugas observasi, tugas pembuatan makalah, tugas pembuatan prototipe teknologi yang terkait dengan pemberantasan korupsi, dan tugas-tugas lain yang disesuaikan dengan karakteristik program studi pada perguruan tinggi masing-masing. Dikti memberikan wewenang bagi pengelola Perguruan Tinggi untuk menjadikan PAK sebagai pelajaran sisipan, mata kuliah pilihan ataupun wajib. PAK dapat berupa sosialisasi, kampanye, seminar, diskusi hingga mata kuliah wajib atau pilihan yang diselenggarakan di perguruan tinggi, atau melalui kegiatan non formal seperti sosialisasi, kampanye atau seminar.

### **Perumusan Hipotesis**

Siegel dan Marconi (1989) mengartikan persepsi adalah keadaan bagaimana seseorang menginterpretasikan kejadian, objek, dan orang. Seseorang akan bertindak menurut persepsi yang mereka miliki, tanpa memperhatikan apakah persepsi tersebut tepat atau tidak tepat mencerminkan realita yang ada. Jadi, persepsi adalah suatu keadaan dimana seseorang menfasirkan suatu perilaku yang ada. Persepsi seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah dari faktor internal orang tersebut dan faktor eksternal, diantaranya orang yang membentuk persepsi, stimulus yang berupa obyek maupun peristiwa tertentu dan stimulasi dimana pembentukan persepsi itu terjadi baik tempat, waktu dan suasana (Walgito dan Bimo.1999).

Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan oleh individu secara sadar untuk memperoleh perubahan perilaku seperti dalam pengetahuan, kebiasaan, keterampilan, sikap, persepsi kebiasaan dan tingkah laku afektif

lainnya sebagai hasil dalam pengalaman (Slameto, 2003). Proses belajar salah satunya dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah. Suharsaputra (2012) menyatakan bahwa pendidikan merupakan upaya normatif yang mengacu pada nilai-nilai mulia yang menjadi bagian dari kehidupan bangsa, yang dengannya nilai tersebut dapat dilanjutkan melalui peran transfer pendidikan baik aspek kognitif, sikap maupun ketrampilan. Pendidikan membimbing manusia menjadi manusia manusiawi yang makin dewasa secara intelektual, moral dan sosial, dalam konteks ini pendidikan merupakan pemelihara budaya.

Korupsi merupakan salah satu bentuk dari *fraud* atau kecurangan, yang tentunya juga merupakan salah satu perbuatan yang tidak etis. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan (Jain, 2006). Agar pendidikan dapat dijalankan secara maksimal, perlu ada sinergi antara teori dalam pendidikan moral dengan kenyataan hidup yang diamati dan dialami dalam keseharian (Falah, 2012). Harus dibuat perbedaan antara korupsi dalam pengelolaan sektor pendidikan (korupsi dalam pendidikan) dan pendidikan sebagai sarana untuk memerangi korupsi (kurikulum, metode yang digunakan, dan mobilisasi sasaran). Agar integritas tercapai dan perilaku tidak etis dapat dicegah, diperlukan lingkungan yang mendukung dalam penyerapan nilai-nilai pengajaran. (Hallak, 2005).

Ludigdo (1998) menyatakan kematangan dari seseorang akan mempengaruhi persepsi etisnya. Kematangan merupakan suatu tingkat atau fase dalam pertumbuhan seseorang, di mana alat-alat dan tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru (Slameto, 2003). Kematangan bisa berarti dari segi usia maupun dari segi pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh. Dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi, tentu ada tingkatan atau jenjang yang harus ditempuh setiap mahasiswa. Harahap (2010) membuat penelitian mengenai perbedaan persepsi mahasiswa lama dan baru mengenai *fraud* dan Ang (2012) membuat penelitian mengenai perbedaan persepsi mahasiswa lama dan baru mengenai profesi akuntan.

Pendidikan anti korupsi adalah salah bentuk materi pendidikan baru yang akan diterima mahasiswa di Indonesia, termasuk mahasiswa jurusan akuntansi. Sebagai sasaran penerima pendidikan anti korupsi, mahasiswa baru dan mahasiswa lama bisa jadi akan memiliki persepsi yang berbeda dalam memandang hal ini. Dalam proses pembelajaran, ada faktor-faktor yang akan mempengaruhi persepsi mahasiswa. Mahasiswa dan pendidikan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Ang (2012) menyatakan bahwa mahasiswa senior dan junior memiliki pengetahuan yang berbeda karena perbedaan pengetahuan yang mereka peroleh. Seperti mahasiswa baru yang baru saja lulus dari SMA akan memiliki pengetahuan yang berbeda dibandingkan dengan mahasiswa tingkat akhir yang telah memahami dan melewati perkuliahan selama masa studinya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin menemukan apakah terdapat perbedaan persepsi mahasiswa jurusan akuntansi yang baru menempuh kuliah dan mahasiswa tingkat atas yang akan mengakhiri masa kuliah mengenai penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Oleh karena itu, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>A</sub> : Terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa lama dengan mahasiswa baru tentang penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, karena berfokus pada teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Nazir (2003), metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi dan Sampel**

Populasi yang digunakan adalah mahasiswa jurusan akuntansi Strata-1 (S1) Universitas Brawijaya Malang semester I dan semester VII pada tahun ajaran 2014/2015. Jumlah mahasiswa aktif semester I adalah 249 orang dan mahasiswa aktif semester VII sebanyak 268 orang. Peneliti mengambil sampel sebanyak 100 sampel yang terdiri dari 50 mahasiswa semester I dan 50 mahasiswa akuntansi semester VII, sesuai dengan pendapat Sekaran (2006), yakni ukuran sampel yang tepat adalah 30 sampai 300 sampel. Metode pengambilan sampel yaitu *simple random sampling* yakni pengambilan sampel secara acak sederhana, karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2011). Peneliti menggunakan metode *simple random sampling* dikarenakan semua anggota populasi berpeluang menjadi sampel.

### **Data Penelitian**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan peneliti langsung dari responden penelitian yang mengisi kuisisioner. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuisisioner. Penyebaran kuisisioner diberikan secara langsung kepada responden. Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2009:142).

### **Variabel Penelitian**

Variabel yang digunakan dalam penelitian, mengacu dari berbagai sumber sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

**Variabel Penelitian X1 : Persepsi Umum Mahasiswa Akuntansi tentang Korupsi**

<b>Variabel</b>	<b>Definisi Operasional Variabel</b>	<b>Sumber</b>
<b>Persepsi Umum Mahasiswa tentang Korupsi (X1)</b>	Menunjukkan persepsi umum mahasiswa tentang korupsi	KPK (2012)
<b>Indikator</b>	<b>Definisi Operasional Indikator</b>	<b>Sumber</b>
X1 : Persepsi Korupsi dari sisi nilai	Menunjukkan apakah responden menilai korupsi sebagai perbuatan yang baik/buruk	Hamzah (2006)
X2 : Persepsi Korupsi dari sisi kerugian yang ditimbulkan	Menunjukkan apakah responden menilai korupsi sebagai perbuatan yang merugikan	Puspito, et al. (2011)
X3 : Pengetahuan tentang faktor-faktor penyebab korupsi	Menunjukkan pengetahuan responden mengenai faktor-faktor penyebab korupsi	Puspito, et al. (2011)
X4 : Pengetahuan tentang dampak negatif dari korupsi	Menunjukkan pengetahuan responden mengenai dampak negatif dari korupsi	Puspito, et al. (2011)
X5 : Pemahaman mahasiswa bahwa korupsi merupakan kejahatan yang melanggar hukum	Menunjukkan pemahaman responden bahwa korupsi merupakan kejahatan yang melanggar hukum	KPK (2011)
X6 : Hukuman bagi koruptor	Menunjukkan penilaian responden mengenai hukuman untuk koruptor	TI Indonesia (2011)
X7 : Persepsi mahasiswa tentang dukungan terhadap lembaga anti korupsi (KPK)	Menunjukkan dukungan mahasiswa terhadap lembaga anti korupsi	KPK (2012)
X8 : Peran mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi	Menunjukkan persepsi responden menilai peran mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi	KPK (2012)

*Sumber : Diolah dari berbagai sumber, 2014*

**Tabel 3.2**



**Variabel Penelitian X2 : Persepsi Umum Mahasiswa Akuntansi tentang Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi**

<b>Variabel</b>	<b>Definisi Operasional Variabel</b>	<b>Sumber</b>
<b>Persepsi Tentang Penyelenggaraan Anti Korupsi (X2)</b>	Menunjukkan persepsi mahasiswa tentang pendidikan korupsi di perguruan tinggi	Dirjen Dikti (2012)
<b>Indikator</b>	<b>Definisi Operasional Indikator</b>	<b>Sumber</b>
X1 : Penilaian nilai tambah penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi secara umum	Menunjukkan apakah mahasiswa menilai penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi secara umum bernilai tambah	Puspito, et al. (2011)
X2 : Dukungan pendidikan anti korupsi sebagai mata kuliah wajib	Menunjukkan dukungan mahasiswa terhadap pendidikan anti korupsi	Dirjen Dikti (2012)
X3 : Dukungan pendidikan anti korupsi sebagai mata kuliah pilihan	Menunjukkan dukungan mahasiswa terhadap pendidikan anti korupsi	Dirjen Dikti (2012)
X4 : Dukungan pendidikan anti korupsi yang tergabung dengan mata kuliah lain	Menunjukkan dukungan mahasiswa terhadap pendidikan anti korupsi yang tergabung dengan mata kuliah lain	Dirjen Dikti (2012)
X5 : Dukungan pendidikan anti korupsi melalui kegiatan non formal	Menunjukkan dukungan mahasiswa terhadap pendidikan anti korupsi melalui kegiatan non formal	Dirjen Dikti (2012)
X6 : Penilaian nilai pendidikan anti korupsi melalui perkuliahan apabila diselenggarakan di jurusan akuntansi	Menunjukkan apakah responden menilai penyelenggaraan pendidikan anti korupsi melalui perkuliahan di jurusan akuntansi bernilai tambah	Dirjen Dikti (2012)
X7 : Penilaian nilai pendidikan anti korupsi melalui kegiatan non formal apabila diselenggarakan di jurusan akuntansi	Menunjukkan apakah responden menilai penyelenggaraan pendidikan anti korupsi melalui kegiatan non formal di jurusan akuntansi bernilai tambah	Dirjen Dikti (2012)

*Sumber : Diolah dari berbagai sumber, 2014*

**Pengukuran Variabel**

Pengukuran variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan kuisisioner skala ordinal dengan tipe skala *likert*. Skala likert merupakan metode yang mengukur sikap melalui pernyataan setuju dan ketidak-setujuannya terhadap suatu hal. Skala likert yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan empat rentang, dengan tidak menyertakan jawaban netral karena peneliti ingin menghindari terjadinya *central tendency effects*, yakni kecenderungan responden untuk memberikan penilaian pada pusat gejala yang dapat terjadi pada keadaan biasa ataupun pada kejadian yang meragukan. Penyerahan kuisisioner kepada responden penelitian dilakukan dengan cara diberikan langsung di tempat responden berada. Waktu pengumpulan yakni seketika itu juga setelah kuisisioner diisi. Penelitian ini menggunakan kuisisioner sebagai instrumen, karena itu perlu dilakukan beberapa pengujian untuk memastikan kualitas instrumen penelitian. Uji instrumen ini telah melewati tahapan uji pilot (*pilot test*) validitas dan reabilitas. Uji pilot dilakukan untuk meyakinkan bahwa item-item kuisisioner telah mencukupi, benar, dan dapat dipahami, dengan cara meminta responden melengkapi kuisisioner dan memberi komentar apakah kuisisioner sudah jelas dan dapat dipahami. Ukuran responden untuk uji pilot ini sekitar 10 sampai 30 responden (Jogiyanto, 2013). Penulis menggunakan 30 responden dalam uji pilot yang terdiri dari 15 orang mahasiswa semester I dan 15 orang mahasiswa semester VII.

### Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan *independent sample T-Test*, untuk membandingkan dua kelompok mean dari dua kelompok sampel yang berbeda, dengan taraf signifikansi  $\alpha=0,05$  yang artinya derajat kesalahan sebesar 5%.

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Menurut Sekaran (2006), validitas adalah bukti instrumen, teknik, atau proses yang digunakan untuk mengukur sebuah konsep yang dimaksudkan. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan *bivariate correlation* untuk menguji korelasi masing-masing skor butir indikator terhadap total skor konstruk (Ghozali, 2011). Berdasarkan tabel 4.4 terlihat bahwa total skor konstruk menunjukkan hasil yang signifikan  $<0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan pada kuisisioner dinyatakan valid sehingga instrumen penelitian dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

**Tabel 4.4**

### Uji Validitas

Variabel	Item	Validitas		
		<i>Pearson Correlatiion</i>	Sig	Kesimpulan
Persepsi Tentang Korupsi (X1)	X1.1	0,300	0,02	Valid
	X1.2	0,750	0,00	Valid
	X1.3	0,779	0,00	Valid
	X1.4	0,624	0,00	Valid

	X1.5	0,751	0,00	Valid
	X1.6	0,839	0,00	Valid
	X1.7	0,633	0,00	Valid
	X1.8	0,563	0,00	Valid
Persepsi Tentang Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi (X2)	X2.1	0,703	0,00	Valid
	X2.2	0,789	0,00	Valid
	X2.3	0,786	0,00	Valid
	X2.4	0,496	0,00	Valid
	X2.5	0,625	0,00	Valid
	X2.6	0,711	0,00	Valid
	X2.7	0,683	0,00	Valid

Sumber : Data Diolah, 2014

### Uji Reabilitas

Uji reabilitas adalah pengujian yang bertujuan untuk mengukur kekonsistenan seseorang terhadap item pertanyaan dalam kuisisioner (Sekaran, 2006). Uji reabilitas dilakukan dengan menggunakan *Cronbach Alpha*. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,700 (Ghozali,2011). Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.5. Dapat diketahui bahwa setiap variabel reliabel karena menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* > 0,700, yang sehingga instrumen penelitian dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

**Tabel 4.5**

### Uji Reabilitas

Variabel	Nilai <i>Cronbach Alpha</i>	Kesimpulan
Persepsi Tentang Korupsi (X1)	0,811	Reliabel
Persepsi Tentang Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi (X2)	0,871	Reliabel

Sumber : Data Diolah, 2014

## Analisis Deskriptif Data Penelitian

Tabel 4.6

### Statistik Deskriptif mengenai Persepsi Mahasiswa Akuntansi Persepsi Tentang Korupsi Secara Umum

Item	Mahasiswa Lama				Mahasiswa Baru			
	Jawaban Terbanyak	Frekuensi	%	Mean	Jawaban Terbanyak	Frekuensi	%	Mean
X1.1	Setuju	34	68%	3,27	Setuju	33	66%	3,27
X1.2	Sangat setuju	42	84%	3,76	Sangat setuju	36	72%	3,76
X1.3	Sangat setuju	34	68%	3,62	Sangat setuju	31	62%	3,62
X1.4	Sangat setuju	32	64%	3,69	Sangat setuju	37	74%	3,69
X1.5	Sangat setuju	25	50%	3,46	Setuju	26	52%	3,46
X1.6	Sangat setuju	31	62%	3,62	Sangat setuju	35	70%	3,62
X1.7	Sangat setuju	35	70%	3,85	Sangat setuju	48	96%	3,83
X1.8	Setuju	28	56%	3,16	Setuju	26	52%	3,16

Sumber : Data Diolah, 2014

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui statistik deskriptif tentang persepsi mahasiswa tentang korupsi secara umum. Rata-rata kedua kelompok responden memiliki persepsi tentang korupsi yang tinggi, dibuktikan dengan rata-rata setiap item pertanyaan berada di sekitar 3. Indikator persepsi tentang korupsi yang paling dominan adalah indikator X1.7 yaitu pertanyaan yang berbunyi “Saya mendukung upaya KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia” yang mencapai rata-rata 3,85 untuk mahasiswa lama dan 3,83 untuk mahasiswa baru. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden mendukung adanya lembaga anti korupsi dengan contoh KPK. Sedangkan indikator persepsi tentang korupsi yang paling lemah adalah indikator X1.8 yaitu pertanyaan yang berbunyi “Sebagai mahasiswa saya juga turut memiliki peran dalam upaya pemberantasan korupsi” yang mencapai rata-rata 3,16. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden menilai bahwa mahasiswa cukup memiliki peran dalam upaya pemberantasan korupsi.

Dalam persepsi responden menilai korupsi, mayoritas responden sangat setuju menyatakan korupsi adalah perbuatan yang buruk. Mayoritas responden juga menilai korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan. Mayoritas responden sangat setuju menyatakan korupsi adalah kejahatan yang melanggar hukum mahasiswa lama mahasiswa baru dan sangat setuju apabila koruptor

diberikan hukuman. Sedangkan mengenai pengetahuan tentang korupsi, mayoritas responden mengetahui faktor-faktor penyebab korupsi, dan dampak negatif dari korupsi. Mengenai upaya pemberantasan korupsi, mayoritas responden mendukung lembaga anti korupsi KPK dalam pemberantasan korupsi dan sependapat jika mahasiswa turut memiliki peran dalam pemberantasan kasus korupsi.

#### 4.3.2.2 Analisis Deskriptif Persepsi Mahasiswa Akuntansi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi

**Tabel 4.7**

#### Statistik Deskriptif Persepsi Mahasiswa Akuntansi tentang Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi

Item	Mahasiswa Lama				Mahasiswa Baru			
	Jawaban Terbanyak	Frekuensi	%	Mean	Jawaban Terbanyak	Frekuensi	%	Mean
X2.1	Setuju	27	54%	3,33	Setuju	30	60%	3,33
X2.2	Setuju	29	58%	3,06	Setuju	25	50%	3,06
X2.3	Setuju	33	66%	3,09	Setuju	30	60%	3,09
X2.4	Setuju	26	52%	3,09	Setuju	34	68%	3,09
X2.5	Setuju	33	66%	3,08	Setuju	35	70%	3,08
X2.6	Setuju	32	64%	3,22	Setuju	36	72%	3,22
X2.7	Setuju	33	66%	3,14	Setuju	38	76%	3,14

Sumber : Data Diolah, 2014

Berdasarkan tabel 4.7 di atas diketahui hasil statistik deskriptif persepsi mahasiswa akuntansi di perguruan tinggi. Mayoritas responden memiliki persepsi tentang pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi yang tinggi, dibuktikan dengan rata-rata setiap item pertanyaan berada di sekitar angka 3. Secara umum, mayoritas responden menilai bahwa pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi akan memberikan nilai tambah. Mayoritas responden mendukung penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi untuk jurusan akuntansi FEB UB diselenggarakan melalui perkuliahan, yakni melalui mata kuliah wajib, mata kuliah wajib pilihan, tergabung dengan mata kuliah lain, maupun melalui kegiatan non formal. Sedangkan jika pendidikan anti korupsi diselenggarakan di jurusan akuntansi FEB UB, responden menilai bahwa mahasiswa akan mendapat nilai tambah baik melalui kegiatan non formal maupun melalui perkuliahan. Dari frekuensi jawaban yang diberikan responden, mahasiswa lama mendukung jika diselenggarakan melalui mata kuliah pilihan

sedangkan mayoritas mahasiswa baru lebih mendukung jika diselenggarakan melalui kegiatan non formal.

### Uji Homogenitas

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Homogenitas Varians**

Variabel	<i>Leneve's Test</i>	<i>P-value (sig.)</i>	Keterangan
Persepsi Tentang Korupsi Secara Umum	0,988	0,323	Homogen
Persepsi Tentang Pendidikan Anti Korupsi di Peguruan Tinggi	0,988	0,323	Homogen

*Sumber : Data Diolah, 2014*

Uji homogenitas varians skor persepsi tentang korupsi mahasiswa lama dengan mahasiswa baru bertujuan untuk mengetahui apakah skor kedua kelompok tersebut memiliki varians yang homogen atau heterogen. Dari tabel 4.10 di atas dapat diketahui uji homogenitas. Pada variabel persepsi tentang korupsi diperoleh nilai *p-value (sig.)* sebesar 0,342. Nilai tersebut lebih besar daripada nilai *alpha* dengan taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa varians skor kedua kelompok data (mahasiswa lama dan mahasiswa baru) dinyatakan sama atau Homogen. Sedangkan pada variabel persepsi tentang korupsi secara umum diperoleh nilai *p-value (sig.)* sebesar 0,323. Nilai tersebut lebih besar daripada nilai *alpha* dengan taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa varians skor kedua kelompok data mahasiswa lama dan mahasiswa baru dinyatakan homogen.

#### 4.4.2 Uji Hipotesis (Uji t Sampel Bebas)

Selanjutnya dilakukan pengujian kesamaan dua nilai rata-rata skor mahasiswa lama dengan mahasiswa baru dengan menggunakan uji-t pada taraf signifikansi  $\alpha=0,05$  (uji dua pihak,  $\frac{1}{2}\alpha=0,025$ ) dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

- a. Jika probabilitas  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima
- b. Jika probabilitas  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak

Hipotesis statistik :

$H_0$  : Tidak terdapat perbedaan signifikan antara skor data mahasiswa lama dengan mahasiswa baru

$H_1$  : Terdapat perbedaan signifikan antara skor data mahasiswa lama dengan mahasiswa baru.

**Tabel 4.9**  
**Uji Beda T-test**

Variabel	T- hitung	<i>P- value (sig.)</i>	Keterangan
Persepsi Tentang Korupsi	0,532	0,597	Tidak Berbeda signifikan
Persepsi Tentang Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi	0,170	0,866	Tidak Berbeda signifikan

*Sumber : Data Diolah, 2014*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil uji perbandingan kedua kelompok data pada kedua variabel. Pada variabel persepsi tentang korupsi, dihasilkan t hitung sebesar 0,532 dengan nilai *p-value (sig.)* sebesar 0,597. Dikarenakan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ( $0,532 < 0,05$ ) maka hipotesis statistik menyatakan untuk menerima  $H_0$ . Artinya tidak terdapat perbedaan signifikan antara mahasiswa lama dengan mahasiswa baru pada variabel persepsi tentang korupsi.

Pada variabel persepsi tentang pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi dapat diketahui nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ( $0,866 > 0,05$ ), maka hipotesis statistik menyatakan untuk menerima  $H_0$ . Artinya tidak terdapat perbedaan signifikan antara mahasiswa lama dengan mahasiswa baru pada variabel persepsi tentang pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi.

### **Pembahasan**

$H_A$  : Tidak terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa lama dengan mahasiswa baru tentang penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, dapat diketahui bahwa tidak ada perbedaan persepsi yang signifikan antara mahasiswa baru maupun mahasiswa lama tentang penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi, yang artinya persepsi mahasiswa baru dan mahasiswa lama relatif sama. Hal ini berarti

H<sub>A</sub> ditolak. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang serupa sebelumnya, Harahap (2010) menyatakan tidak ada perbedaan persepsi antara mahasiswa baru dan mahasiswa lama jika dilihat dari persepsi tentang *fraud* dan Ang (2012) menyatakan tidak terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa baru dan mahasiswa lama mengenai profesi akuntan.

Welsh, *et al.* (2011) menyatakan generasi Y merupakan generasi yang lahir dari tahun 1980 hingga tahun 2000an. Generasi ini memiliki memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengakses teknologi dan informasi baru, lebih mudah menerima perubahan, memiliki keingintahuan yang cukup tinggi, dan tidak terlalu suka hal yang mendetail. Mahasiswa baru maupun mahasiswa lama yang sekarang tengah duduk di bangku kuliah tentu merupakan generasi Y dengan rentang usia yang tidak jauh berbeda. Dengan kesamaan ciri yang dimiliki generasi Y, hal ini akan cenderung membuat mereka menilai atau mempersepsikan sesuatu dengan sama atau tidak jauh berbeda. Apalagi saat ini merupakan era kemudahan dalam mengakses teknologi informasi yang serta *blow up* media yang tinggi mengenai kasus korupsi akan membuat bertambahnya pengetahuan mahasiswa mengenai korupsi dan pentingnya pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi.

Kesamaan persepsi mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi hal ini juga disebabkan oleh adanya kesamaan persepsi mahasiswa baru dan mahasiswa lama mengenai korupsi. Mayoritas responden sangat mempersepsikan korupsi sebagai suatu perbuatan yang buruk, merugikan, memahami bahwa korupsi adalah kejahatan yang melanggar hukum, dan mendukung adanya hukuman bagi pelaku korupsi. Responden juga mendukung upaya pemberantasan korupsi dengan mendukung adanya lembaga anti korupsi di Indonesia, dengan contoh KPK, dan mempersepsikan mahasiswa juga turut memiliki peran dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini menunjukkan responden memiliki pemahaman dan pengetahuan mengenai korupsi yang sama baiknya.

Mahasiswa lama dan baru sama-sama mempersepsikan dukungan terhadap pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Kelompok mahasiswa lama umumnya telah memiliki pengetahuan yang lebih luas dari sisi perkuliahan, dikarenakan mahasiswa lama telah menempuh lebih banyak mata kuliah. Mahasiswa lama telah menerima mata kuliah etika bisnis yang merupakan mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa akuntansi atau mata kuliah *accounting forensic and fraud examination*, yang merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa akuntansi konsentrasi bisnis dan merupakan mata kuliah pilihan bagi konsentrasi lain. Kedua mata kuliah tersebut mengandung nilai-nilai anti korupsi dalam materinya, sehingga mahasiswa lama telah merasakan nilai tambah dari pendidikan anti korupsi, meskipun pendidikan anti korupsi tidak disajikan melalui mata kuliah tersendiri.

Mayoritas mahasiswa baru juga menerima penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Selepas lulus SMA, rasa keingintahuan untuk menimba ilmu di perguruan tinggi akan cenderung bertambah. Selain itu adanya



masa orientasi sebelum memasuki bangku perguruan tinggi, mampu membuat mahasiswa baru lebih antusias dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Responden memberikan jawaban persepsi yang tinggi terhadap item-item pertanyaan yang diberikan. Hal ini menunjukkan antusiasme responden terhadap pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi.

## **SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

### **Simpulan**

1. Persepsi antara mahasiswa baru dan mahasiswa lama relatif sama, dalam hal mempersepsikan korupsi secara umum maupun mempersepsikan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi.
2. Responden mempersepsikan korupsi sebagai perbuatan yang buruk dan merugikan, serta memahami bahwa korupsi merupakan kejahatan yang melanggar hukum. Responden juga menyatakan bahwa koruptor harus diberikan hukuman atas perbuatannya.
3. Responden menyatakan dukungannya terhadap lembaga anti korupsi (KPK). Responden juga berpendapat bahwa mahasiswa juga memiliki peran dalam pemberantasan korupsi.
4. Dalam memandang penyelenggaraan pendidikan anti korupsi secara umum, mayoritas responden mempersepsikan bahwa pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi akan memberikan nilai tambah. Apabila pendidikan anti korupsi diselenggarakan di jurusan akuntansi FEB UB, mayoritas responden mendukung dalam bentuk perkuliahan maupun kegiatan non formal

### **Keterbatasan dan Saran**

1. Penelitian ini terbatas di jurusan akuntansi FEB UB sebagai populasi dengan sampel yang digunakan mahasiswa semester I dan semester VII. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan dengan memperluas populasi dan sampel penelitian agar dapat digeneralisir secara lebih luas, karena penelitian mungkin akan memberikan hasil yang berbeda di sampel, populasi, dan tempat yang berbeda.
2. Penelitian ini memiliki keterbatasan instrumen. Penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan dengan metode yang berbeda, memperluas kuisisioner, dan menambah jumlah referensi riset-riset terdahulu mengenai *fraud* sehingga instrumen menjadi lebih komprehensif, cakupan penelitian menjadi lebih luas, serta mampu mengungkap persepsi secara utuh.

## DAFTAR RUJUKAN

- ACFE. 2014. *Report to the Nations*. ACFE, 1-80.
- Azhar, Muhammad et al. 2004. *Pendidikan Anti Korupsi*. Yogyakarta : LP3 UMY.
- Black, Henry Campbell. 1990. *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, West Publishing , St. Paul.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. *Buku Pedoman Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2013/2014*. Malang : UB.
- Falah, F. 2012. *Perilaku Korup di Mata Mahasiswa. Prosiding Seminar Nasional Psikologi Islami 2012*, 151-158.
- Ferrell, O., D. LeClair and L. Ferrell: 1998. *The Federal Sentencing Guidelines for Organizations: A Framework for Ethical Compliance*. *Journal of Business Ethics* 17, 353-363.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gibson, J.L., J.M. Ivancevich, J.H. Donnelly, Jr., 1996. *Perilaku, Struktur, Proses Organisasi*. Jakarta : Bina Rupa Aksara.
- Gonzales, De Asis Maria and World Bank. 2000. *Coalition-Building to Fight Corruption. Paper Prepared for the Anti-Corruption Summit*, 1-10.
- Hallak, J., and Poisson, M. 2005. *Ethics and corruption in education: an overview*. *Journal of Education for International Development* 1 (1), 1-16.
- Harahap, S.Wira. Tanpa Tahun. *Persepsi Mahasiswa Akuntansi Universitas Maritim Raja Haji Ali Terhadap Kecurangan*. *Jurnal Penelitian Universitas Maritim Raja Haji*. Jurnal tidak dipublikasikan.
- Irianto, Gugus. 2003. *Skandal Korporasi dan Akuntan*. *Lintasan Ekonomi* Volume XX, Nomor 2. Juli 2003 : 104-113.
- Jain, Arvind, K. 2001. *Corruption : A Review*. *Journal of Economics Surveys* Vol. 15, No. 1, 72-121.
- Jogiyanto. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta : BPFE- Yogyakarta.
- Kemp, G. 2010. *Fighting Public Sector Fraud in the 21st Century*. *Computer Fraud and Security*, 16-18.
- Maheka, Arya. 2009. *Mengenal dan Memberantas Korupsi*. Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Mauro, Paolo. 1995, *Corruption and Growth Quaterly*. *Journal of Economic* 110, 681-712.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, Yogi. 2012. *Pendidikan Anti Korupsi sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi*. Universitas Muhamadiyah Ponorogo. Jurnal tidak dipublikasikan.
- Puspito, N.T., M. Elwina S., I.S. Utari, Y. Kurniadi. 2011. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian.

- Robbins, Stephen P. 2006. *Perilaku Organisasi*. Jakarta : PT Indeks.
- Sekaran, Uma. 2006. Buku seri a. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat
- Siegel R, Marconi. 1989. *Behavioral Accounting*. South Westren Publishing Co.
- Sugiyono. 2011. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Tim MCW. 2005. Seri *Pendidikan Anti Korupsi Mengerti dan Melawan Korupsi*. Jakarta : Kerjasama YAPPIKA dan MCW.
- Tim Prima Pena. Tanpa Tahun. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta : Gitamedia Press.
- , Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang *Hal-hal Mendasar tentang Fungsi, Tujuan, Pengembangan Ilmu dan lainnya pada Perguruan Tinggi*.
- Warren, M, E. 2006. *Political Corruption as Duplicitous Exclusion*. *Political Science and Politics Vol.37*, 803-807.
- Welsh, Mary Jeanne and Brazina R.Paul. 2011. *Gen Y Anatomy Lesson*. *Pennsylvania CPA Journal*, Fall, Vol. 81 Issue 3, 1.
- Wijayanto dan Zachrie, R. 2009. *Korupsi Mengorupsi Indonesia : Sebab Akibat dan Prospek Pemberantasan*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- K, Dista. 2014, 26 Juni. *Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli*. Diakses 15 Juni 2014 dari <http://idiesta.blogspot.com/2012/06/pengertian-korupsi.html>.
- KPK. Tanpa Tahun. *Definisi Korupsi*. Diakses 15 Juni 2014 dari <http://www.kpk.go.id/id/faq>
- KPK. (2012). *Mahasiswa Pendobrak Gerakan Antikorupsi*. Diakses 13 Oktober 2014 dari <http://acch.kpk.go.id/>
- Suharsaputra, U. 2012. *Budaya Korupsi dan Pendidikan*. Diakses 10 November 2014 dari <http://uharsaputra.wordpress.com/artikel-2/budaya-korupsi-dan-pendidikan/>
- Supelli, K. (2014, 10 Mei). *Mengartikan Revolusi Mental*. Diakses 8 September 2014 dari [www.jokowi.id](http://www.jokowi.id)
- Transparency International Indonesia. 2011. *Hukuman Korupsi Belum Buat Jera Koruptor*. Diakses 3 November 2014 dari <http://www.ti.or.id/>

